

PUBLIC TRUST PENANGANAN STUNTING PADA STREET LEVEL BUREAUCRACY

PUBLIC TRUST IN HANDLING STUNTING AT THE STREET LEVEL BUREAUCRACY

Riyadi*, Erna Setijaningrum, Falih Suaedi

Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya

*Koresponden email: riyadi-2021@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka *stunting* tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2021 dengan angka tertinggi kasus *stunting* di salah satu desa mencapai 80%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penanganan *stunting* sangat penting untuk dilakukan termasuk di tingkat *street level bureaucracy* yang merupakan garda terdepan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, *public trust* memiliki peran penting untuk membangun kinerja pemerintah desa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *public trust* terhadap penanganan *stunting* pada tingkat *street level bureaucracy* di Kabupaten Tuban. Peneliti menggunakan *OECD Framework on Drivers of Trust in Public Institutions* (2017) sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa dengan urutan kasus *stunting* tertinggi di Kabupaten Tuban yaitu Desa Brangkal, Desa Sumberejo, dan Desa Kedungrejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *public trust* terhadap penanganan *stunting* pada *street level bureaucracy* di Kabupaten Tuban telah memenuhi keempat dimensi yaitu *responsiveness* (ketanggapan), *reliability* (keandalan), *integrity* (integritas), dan *fairness* (keadilan). Akan tetapi belum memenuhi dimensi *openness* (keterbukaan). Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh *street level bureaucracy* di Kabupaten Tuban agar selalu memperbarui dan membagikan informasi publik serta mengembangkan layanan-layanan dalam pengendalian *stunting* yang lebih inovatif agar dapat menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Tuban

Kata kunci: Kepercayaan publik; birokrasi level desa; pengkerdilan

ABSTRACT

Tuban Regency is one of the districts that has the highest stunting rate in East Java in 2022 with the highest number of stunting cases in one village reaching 80%. This number shows that it is very important to handle stunting, including at the street level bureaucracy, which is the government's front guard. In its implementation, public trust has an important role in building village government performance.. This study aims to examine public trust in the handling of stunting at the street level bureaucracy in Tuban Regency. Researchers use the OECD Framework on Drivers of Trust in Public Institutions (2017) as a guide in conducting research. The research method used is a qualitative method. This research was conducted in three villages with the highest order of stunting cases in Tuban Regency, namely Brangkal Village, Sumberejo Village, and Kedungrejo Village. The results show that public trust in handling stunting at the street level bureaucracy in Tuban Regency has fulfilled all four dimensions, namely responsiveness, reliability, integrity, and fairness. However, it has not fulfilled the dimension of openness. Recommendations that can be carried out by the street level bureaucracy in Tuban Regency to always update and share public information and develop more innovative stunting handling services in order to reduce stunting rates in Tuban Regency.

Keywords: Public trust, street level bureaucracy, stunting

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak-anak yang disebabkan karena kekurangan gizi. *World Health Organization* (2018) mendefinisikan *stunting* sebagai kegagalan pertumbuhan linier yang terjadi pada anak-anak yang berusia 0-5 tahun dengan ukuran tinggi badan lebih dari 2 standar deviasi (SD) berada di bawah median tinggi badan normal menurut standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh WHO. Anak yang mengalami *stunting* tidak hanya ditandai dengan tubuh yang kecil dan kurus tetapi juga digambarkan dengan tubuh yang gemuk dan pendek.

Kondisi *stunting* terjadi di usia krusial seorang anak atau 1000 hari pertama kehidupan

seorang anak. Pada kurun waktu tersebut dianjurkan untuk mencegah terjadinya *stunting* karena pada masa itu otak dan organ tubuh anak mengalami perkembangan yang sangat cepat dan sensitif dalam merespon gizi yang diterima dan lingkungan sekitar (Black dkk., 2017; de Onis & Branca, 2016). Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *stunting* antara lain adalah status sosial ekonomi (Bommer, Vollmer, & Subramanian, 2019; Mohammed, dkk., 2019), asupan makanan dan gizi (Basri dkk., 2021; Mahfouz, dkk., 2022), infeksi penyakit (Raj, dkk., 2022; Webb dkk., 2021), gizi ibu (Singh, dkk., 2021; Sirajuddin dkk., 2021), dan lingkungan (Budge, dkk., 2019; Vilcins, Sly, & Jagals, 2018)

Stunting yang terjadi pada anak memiliki risiko jangka pendek dan jangka panjang yang dapat terjadi. Risiko jangka pendek yang dapat terjadi antara lain adalah meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas, munculnya gangguan pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatnya biaya yang dikeluarkan untuk berobat (Maesarah, dkk., 2021). Sedangkan risiko jangka panjang yang dapat terjadi adalah terhambatnya potensi pembangunan dan *human capital*, menurunnya fungsi kognitif dan produktivitas, serta terjadinya kerusakan fisik dan kognitif. Risiko-risiko yang diakibatkan karena *stunting* tersebut dapat berpengaruh terdapat kualitas generasi yang akan datang (UNICEF, dkk., 2021). Sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan *stunting* se dini mungkin.

Jumlah kasus *stunting* di dunia telah mengalami kenaikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 144 juta anak yang menderita *stunting*, sementara pada tahun 2020 naik menjadi 149,2 juta anak (UNICEF dkk., 2020, 2021). Benua Asia merupakan benua penyumbang kasus *stunting* terbanyak di dunia. Ada sekitar 53% dari keseluruhan jumlah anak *stunting* di dunia yang tinggal di Benua Asia. Dari sekian banyak negara di Asia, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus *stunting* tertinggi di Asia. Databoks (2020) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara penyumbang prevalansi angka *stunting* tertinggi kedua di Asia Tenggara dengan persentase 24,4% atau lebih besar dari standar prevalansi *stunting* yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20%.

Stunting menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Melalui kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah berupaya untuk menurunkan prevalansi angka *stunting* dengan menetapkan 12 provinsi sebagai prioritas percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu provinsi prioritas percepatan penurunan *stunting* yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia, Provinsi Jawa Timur memiliki prevalansi angka *stunting* yang lebih rendah dibandingkan prevalansi angka *stunting* nasional. Pada tahun 2021, prevalansi angka *stunting* Jawa Timur adalah 23,5% sementara prevalansi angka *stunting* nasional adalah 24,4% (BKKBN, 2022). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki prevalansi angka *stunting* yang lebih tinggi dari prevalansi angka *stunting* provinsi Jawa Timur atau bahkan lebih

tinggi dari prevalansi angka *stunting* nasional (Kemenkes, 2022).

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki prevalansi angka *stunting* yang lebih tinggi dari prevalansi angka *stunting* Provinsi Jawa Timur. Persentase angka *stunting* di Kabupaten Tuban pada tahun 2021 adalah sebanyak 25,1%. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan persentase angka *stunting* Provinsi Jawa Timur yaitu 23,5%. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2021, Kabupaten Tuban menduduki peringkat ke-11 sebagai Kabupaten dengan prevalansi angka *stunting* tertinggi di Jawa Timur.

Tingginya kasus *stunting* di Kabupaten Tuban juga didukung dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban tahun 2021 yang menunjukkan bahwa dari 15.275 bayi yang lahir di Kabupaten Tuban, terdapat 1.211 bayi yang mengalami gizi buruk dan 718 bayi memiliki berat di bawah 2.500 gram atau berat badan lahir rendah (BBLR). Gambaran besarnya angka *stunting* di Kabupaten Tuban juga dilihat dari tingginya kasus *stunting* di beberapa desa di Kabupaten Tuban. Bahkan, pada tahun 2022 terdapat salah satu desa di Kabupaten Tuban yang persentasenya mencapai 80% dari keseluruhan balita yang ada di desa tersebut.

Tabel. 1. Desa dengan Prevalensi *Stunting* Tertinggi di Kabupaten Tuban (2022)

No	Desa	Jumlah Balita	Balita dengan status "sangat pendek"	Balita dengan status "pendek"	Total	%
1	Kedungrejo	163	87	51	138	84,66
2	Sumberejo	46	9	16	25	54,35
3	Brangkal	95	13	20	33	34,74
4	Trantang	107	13	24	37	34,74
5	Tanjungrejo	108	15	22	37	34,58
6	Nguruan	156	9	40	49	34,26
7	Mergoasri	84	5	21	26	31,41
8	Jlodro	65	8	12	20	30,95
9	Wadung	49	6	9	15	30,77
10	Tunggulrejo	148	11	34	45	30,61
11	Mulyoagung	241	26	47	73	30,41
12	Kedungjambe	185	18	37	55	30,29
13	Saringembat	205	11	49	60	29,73
14	Medalem	255	24	50	74	29,27
15	Binangun	131	9	29	38	29,02
16	Sidomukti	98	12	15	27	29,01
17	Penambangan	156	17	25	42	27,55
18	Mojoagung	238	12	52	64	26,89
19	Gaji	392	49	52	101	25,77
20	Mergosari	125	9	23	32	25,60

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Tuban (2023)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Kedungrejo memiliki prevalansi *stunting* tertinggi di Kabupaten Tuban dengan persentase

stunting 84,66%. Kemudian kasus *stunting* tertinggi selanjutnya diikuti oleh Desa Sumberejo dan Desa Brangkal dengan angka *stunting* mencapai 54,35% dan 34,74%. Prevalansi angka *stunting* di ketiga desa tersebut berada jauh di atas prevalansi angka *stunting* Kabupaten Tuban yang mana telah melebihi prevalansi angka *stunting* nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian *stunting* di tingkat desa juga sangat penting dilakukan untuk menekan prevalansi angka *stunting* di Kabupaten Tuban.

Pengendalian *stunting* di tingkat desa penting untuk dilakukan karena di tingkat desa pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemerintah dapat menjangkau seluruh sasaran *stunting*. Sebagai unit terkecil pada suatu wilayah, pengendalian *stunting* yang dilakukan di tingkat desa berpengaruh pada gizi dan kondisi kesehatan anak secara keseluruhan di tingkat kabupaten. Selain itu, intervensi gizi juga perlu dilakukan di tingkat desa. Melalui pemerintah desa yang dapat berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan perbaikan perilaku makan. Konsekuensinya pemerintah dapat secara efektif menurunkan prevalansi angka *stunting* (UNICEF, 2018).

Dengan demikian, pengendalian *stunting* di tingkat desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa sebagai *street level bureaucracy* atau garda terdepan dalam penanganan *stunting* yang berada di desa. *Street level bureaucracy* merupakan aparat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan menginterpretasikan kebijakan negara kepada masyarakat (Davidovitz & Cohen, 2022; de Boer & Eshuis, 2018; Lipsky, 2010). Pemerintah Desa Kedungrejo, Desa Sumberejo, dan Desa Brangkal selaku *street level bureaucracy* telah memberikan pelayanan yang adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan masyarakat. Pelayanan yang diberikan berupa pemberian penyuluhan kepada kader posyandu, bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu-ibu yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun kelas pencegahan *stunting* pada ibu hamil setiap 1 tahun 1 kali, serta sosialisasi terkait preventif pernikahan dini dan pencegahan *stunting* kepada masyarakat.

Pelayanan yang adil dan merata yang diberikan oleh pemerintah desa menunjukkan bahwa *street level bureaucracy* pada ketiga desa tersebut telah memenuhi salah satu dimensi *public trust* yang dikemukakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2017) yaitu dimensi keadilan. *Public trust* merupakan keyakinan warga negara kepada pemerintah bahwa pemerintah memenuhi mandat mereka dengan kompetensi dan integritas serta berupaya untuk mengejar manfaat masyarakat yang lebih luas (OECD, 2017). Lima dimensi yang dapat mempengaruhi *public trust* terhadap institusi publik adalah *responsiveness* (ketanggapan), *reliability* (keandalan), *openness* (keterbukaan), *integrity* (integritas), dan *fairness* (keadilan) (OECD, 2017). *Public trust* memiliki peran penting dalam membangun kinerja pemerintah khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik (Salsabila & Kumala, 2022). Akan tetapi meskipun *street level bureaucracy* di ketiga desa tersebut telah memenuhi satu dimensi *public trust*, realitanya ketiga tersebut masih menjadi desa dengan angka *stunting* tertinggi di Kabupaten Tuban. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang mendalam tentang bagaimana *public trust* terhadap penanganan *stunting* pada tingkat *street level bureaucracy* di Kabupaten Tuban.

Pada penelitian ini juga terdapat beberapa studi terdahulu yang digunakan sebagai rujukan. Beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus pada perilaku, motivasi, kepemimpinan, akuntabilitas, dan diskresi di tingkat *street level bureaucracy* (Iswahyudi, 2022; Togola dkk., 2020; Zhang dkk., 2020; Kasmad & Alwi, 2018; Shim dkk. 2017). Sedangkan penelitian terkait *stunting* lebih banyak membahas mengenai dampak, upaya penanggulangan, kerja sama pemerintah, dan pendekatan sosial dalam penanganan *stunting* (Muhtar dkk., 2022; Candarmaweni & Rahayu, 2020; Weather- spoon dkk., 2019; McGovern dkk., 2017). Sementara itu, belum ada penelitian yang membahas tentang *public trust* terhadap penanganan *stunting* pada tingkat *street level bureaucracy*. Oleh karena itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengisi *research gap* tersebut yaitu *public trust* terhadap penanganan *stunting* pada tingkat *street level bureaucracy* di Kabupaten Tuban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji *public trust* terhadap penanganan *stunting* pada tingkat *street level bureaucracy*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif

menggunakan konteks tekstual untuk memperoleh pemahaman tentang motivasi dan alasan yang melatarbelakangi suatu fenomena sosial (Neuman, 2016). Penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki dan memahami makna masalah sosial yang disebabkan oleh individu atau kelompok (Creswell, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa dengan urutan kasus *stunting* tertinggi di Kabupaten Tuban yaitu Desa Brangkal, Desa Sumberejo, dan Desa Kedungrejo. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2017). Penelitian ini merujuk pada kumpulan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat yang meliputi kepala desa, perangkat desa, bidan desa, dan kader posyandu, serta masyarakat (ibu yang memiliki anak *stunting*). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan menentukan informan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan *snowball* dengan mendapatkan rekomendasi informan dari informan kunci. Wawancara mendalam dilakukan secara *semi-structured* dengan tetap berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun. Untuk melengkapi data hasil wawancara dilakukan juga pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi penelitian dan dokumentasi dari literatur-literatur yang relevan.

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses analisis data yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu, *data condensation*, *data display*, *conclusion dan drawing/verifying* (Miles, Michael, & Jonny Saldana, 2014). Analisis data diawali dengan pengumpulan seluruh data dalam bentuk transkrip wawancara, dokumentasi lapangan, dokumen-dokumen dan literatur terkait, serta data empiris lainnya yang selanjutnya dipadatkan dan diringkas agar lebih mudah dipahami. Setelah tahap tersebut, dilakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pembuatan kesimpulan ini, dilakukan juga uji keabsahan data dengan mengkaji data penelitian dengan berbagai data dari berbagai sumber yang berbeda. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dari satu informan dibandingkan dengan data dari informan lainnya. Selanjutnya dibandingkan kembali dengan data dari hasil observasi lapangan dan data dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang

terbaik dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara etis. Akan tetapi, membangun kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan pada institusi publik adalah suatu hal yang tidak mudah. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan melibatkan seluruh pemimpin yang memiliki pengalaman teknis dan pengetahuan dalam menyelenggarakan pemerintahan (Head, 2022). Pada penelitian ini, temuan-temuan tentang kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap penanganan *stunting* pada tingkat *street level bureaucracy* di Kabupaten Tuban dijelaskan menggunakan lima dimensi *public trust* (OECD, 2017) yaitu *responsiveness* (ketanggapan), *reliability* (keandalan), *openness* (keterbukaan), *integrity* (integritas), dan *fairness* (keadilan).

Tabel. 2 Lima Dimensi *Public Trust* terhadap Penanganan *Stunting* pada Tingkat *Street Level Bureaucracy* di Kabupaten Tuban

No	Dimensi	Keterangan	Hasil
1	<i>Responsiveness</i> (ketanggapan)	Terpenuhi	<i>Street level bureaucracy</i> cukup responsif dalam menyediakan layanan dengan cepat apabila ada masyarakat yang membutuhkan informasi, arahan serta panduan dalam pencegahan <i>stunting</i> .
2	<i>Reliability</i> (keandalan)	Terpenuhi	<i>Street level bureaucracy</i> memiliki performa yang baik dalam menciptakan <i>public trust</i> dengan menunjukkan tanggung jawab dan kewenangannya dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, melakukan sosialisasi terkait <i>stunting</i> , dan memberikan bantuan kepada masyarakat.
3	<i>Openness</i> (keterbukaan)	Belum Terpenuhi	<i>Street level bureaucracy</i> masih kurang optimal dalam memberikan informasi publik terkait dengan data <i>stunting</i> kepada masyarakat.
4	<i>Integrity</i> (integritas)	Terpenuhi	<i>Street level bureaucracy</i> telah secara konsisten dan kompak memberikan pelayanan publik dalam penanganan <i>stunting</i> dengan menerapkan dasar hukum dan peraturan yang berlaku.
5	<i>Fairness</i> (keadilan)	Terpenuhi	<i>Street level bureaucracy</i> telah memberikan layanan dalam pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> secara adil dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sumber: Hasil olah data peneliti.

***Responsiveness* (Ketanggapan)**

Responsiveness merupakan daya tanggap pemerintah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien, terjangkau, saling terkoordinir di semua tingkat pemerintahan, serta berfokus pada masyarakat dan kepuasan masyarakat (OECD, 2017). Pada dimensi ini, pemerintah juga diharapkan untuk dapat mengembangkan layanan publik yang lebih efisien dan inovatif sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat (Brezzi, Gonzalez, Nguyen, & Prats, 2021). Dalam penelitian ini, dimensi ketanggapan digambarkan dengan ketanggapan *street level bureaucracy* dalam memberikan pelayanan terkait pencegahan dan penanganan *stunting*. Berdasarkan

hasil penelitian menunjukkan bahwa *street level bureaucracy* cukup responsif dalam menyediakan layanan dengan cepat apabila ada masyarakat yang membutuhkan informasi, bantuan, arahan serta panduan dalam pencegahan *stunting*. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyampaikan bahwa pemerintah desa cukup tanggap dalam menangani permasalahan-permasalahan tentang *stunting* yang dialami oleh masyarakat desa. Seperti, bidan desa yang responsif memberikan arahan dan saran apabila ada warga yang menanyakan terkait cara mengatasi anak yang susah makan.

Kemudian ketanggapan *street level bureaucracy* juga ditunjukkan melalui pelayannya bidan desa yang tanggap melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara *door to door* di luar jadwal posyandu. Selain itu, ketanggapan pemerintah desa dalam menangani *stunting* juga didukung oleh peran kader posyandu di masing-masing desa. Adanya metode 'jemput bola' untuk pendataan ibu hamil yang diterapkan oleh para kader posyandu membantu bidan desa dalam melakukan pemeriksaan dan pencegahan *stunting* sedini mungkin. Ketanggapan *street level bureaucracy* juga dapat dilihat melalui kepercayaan masyarakat dalam anggapan bahwa pemerintah desa dapat menangani permasalahan dan keluhan masyarakat dengan cepat (Murtin dkk., 2018). Masyarakat desa menyampaikan bahwa mereka cukup mengapresiasi bidan desa yang sangat responsif dalam menanggapi keluhan dan aduan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan *stunting*. Dalam hal ini, kecepatan *street level bureaucracy* dalam merespon keluhan masyarakat dapat dilihat melalui sikap bidan desa yang langsung menjawab pertanyaan ibu-ibu di grup *WhatsApp* Posyandu.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dimensi ketanggapan *street level bureaucracy* dalam menangani *stunting* cukup baik. Pemerintah desa sangat responsif dalam memberikan layanan terkait pencegahan dan penanganan *stunting*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *street level bureaucracy* di Kabupaten Tuban telah menumbuhkan *public trust* dengan berhasil memberikan pelayanan yang responsif.

Reliability (Keandalan)

Reliability diartikan sebagai keandalan pemerintah dalam mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi dan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menangani permasalahan (OECD, 2017). Dimensi keandalan ini juga dideskripsikan sebagai komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada

masa depan dan membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan global (Brezzi dkk., 2021). Dalam penelitian ini, dimensi keandalan digambarkan dengan sikap *street level bureaucracy* dalam mengantisipasi dan mendukung masyarakat dalam menangani *stunting*. Pada dimensi keandalan ini masyarakat mengungkapkan bahwa mereka merasa terbantu dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan menangani *stunting* seperti sosialisasi terkait *stunting* dan bantuan makanan. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan posyandu dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti vitamin, susu, dan makanan tambahan untuk anak.

Dalam melakukan pencegahan *stunting*, keandalan pemerintah desa juga diilustrasikan dengan tindakan pemerintah desa yang selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan *stunting* di setiap kegiatan posyandu. Pemerintah desa berharap agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan materi-materi yang diberikan sehingga dapat mencegah *stunting*. Selain melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan makanan, keandalan *street level bureaucracy* juga ditunjukkan melalui pembuatan keputusan kepala desa terkait penetapan kader posyandu dan penganggaran dana untuk penanganan *stunting*. Pernyataan ini juga disampaikan sekretaris desa yang mengatakan bahwa adanya keputusan kepala desa tentang penetapan kader posyandu meningkatkan jumlah SDM yang dimiliki pemerintah desa dalam pencegahan dan penanganan *stunting*.

Hasil penelitian menunjukkan *street level bureaucracy* cukup andal dalam memberikan layanan untuk penanganan *stunting* termasuk dalam membuat kebijakan, sosialisasi tentang *stunting*, dan bantuan kepada masyarakat. Pemerintah yang andal dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan oleh pemerintah (Vaslavskiy, Vaslavskaya, & Bilyalova, 2022). Hal ini terjadi karena keandalan *street level bureaucracy* dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat mempengaruhi keberlanjutan kebijakan jangka panjang yang nyata dan dapat dirasakan masyarakat.

Openness (Keterbukaan)

Openness adalah salah satu dimensi *public trust* yang ditandai dengan adanya keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengawasi tindakan-tindakan pemerintah. Keterbukaan juga diilustrasikan dengan sikap pemerintah yang terbuka dalam

menerima dan menanggapi kritik serta masukan dari para pemangku kepentingan termasuk melalui partisipasi masyarakat dalam membuat suatu keputusan (OECD, 2017).

Dengan demikian, pemerintah juga dapat menjamin terlaksananya demokrasi perwakilan melalui kesempatan berpendapat oleh semua pihak. Akan tetapi, pada penelitian ini, keterbukaan *street level bureaucracy* dalam pencegahan dan penanganan *stunting* masih belum optimal. Temuan penelitian menggambarkan bahwa informasi publik yang terdapat di Desa Kedungrejo, Desa Sumberejo, dan Desa Brangkal masih terbatas terutama terkait data *stunting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui jumlah dan perkembangan anak yang *stunting* di masing-masing desa secara keseluruhan. Pemerintah Desa tidak membagikan data tersebut ke publik. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah desa tidak memiliki arsip pendataan terkait *stunting* di desanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan *street level bureaucracy* menunjukkan bahwa administrasi atau pengarsipan data tentang *stunting* masih minim dan konvensional. Pemerintah desa hanya mengandalkan catatan yang dimiliki oleh puskesmas atau tulisan tangan yang dimiliki oleh bidan desa kader posyandu saat kegiatan posyandu. Beberapa informan dari masyarakat menyampaikan bahwa mereka sering mendapatkan informasi tentang *stunting* seperti tentang kegiatan bantuan sosial untuk penanganan *stunting*, penyuluhan dan posyandu yang dibagikan secara langsung maupun secara daring. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan informasi tentang bagaimana perkembangan *stunting* di desa. Kurangnya informasi publik terkait data *stunting* di desa mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengawasi kinerja pemerintah desa secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa *street level bureaucracy* dalam menangani *stunting* belum memenuhi dimensi keterbukaan. *Street level bureaucracy* di Desa Kedungrejo, Desa Sumberejo, dan Desa Brangkal masih kurang optimal dalam memberikan informasi publik terkait dengan data *stunting* kepada masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada *street level bureaucracy*. Sebab, keterbukaan pemerintah dalam melibatkan partisipasi masyarakat cukup berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan publik. Semakin pemerintah terbuka pada masyarakat, maka semakin tinggi juga kepercayaan masyarakat pada sektor publik (Schmidhuber, Ingrams, & Hilgers, 2021). Sedangkan dalam penelitian ini, keterbukaan informasi publik

tentang data *stunting* di desa yang seharusnya dilakukan oleh *street level bureaucracy* masih belum terlaksana dengan baik.

Integrity (Integritas)

Integrity merupakan dimensi kepercayaan publik yang didefinisikan sebagai konsistensi dalam menyelaraskan tindakan pemerintah dengan nilai-nilai etis, norma, dan prinsip menjaga kepentingan publik (OECD, 2017). Integritas juga dapat diwujudkan dengan terselenggaranya pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya secara etis sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dalam memberantas korupsi. Brezzi dkk. (2021) menjelaskan bahwa dimensi integritas dapat ditunjukkan melalui terjaminnya mekanisme akuntabilitas antar institusi publik di seluruh tingkat pemerintahan dan terciptanya pelayanan publik yang netral dan memprioritaskan kepentingan publik. Integritas para pembuat kebijakan juga dalam penanganan *stunting* cukup berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah (Murtin dkk., 2018).

Dalam penelitian ini, dimensi integritas digambarkan dengan konsistensi *street level bureaucracy* dalam mengimplementasikan nilai, norma, dan kebijakan yang berlaku dalam penanganan *stunting*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *street level bureaucracy* cukup kompak dan konsisten dalam menyelenggarakan pelayanan publik terkait penanganan *stunting* yang berdasar pada nilai, norma dan kebijakan yang berlaku. Pemerintah desa meliputi Kepala Desam Sekretaris Desa, BPD, kepala-kepala urusan, bidan desa, serta para kader posyandu saling terintegrasi dalam melakukan pencegahan *stunting* di desa. Seluruh pihak ikut terlibat aktif dan memahami setiap kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* yang dilakukan sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.

Selain kompak dan memahami setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanganan *stunting*, temuan dari penelitian juga menunjukkan bahwa *street level bureaucracy* juga patuh terhadap aturan dan arahan pemerintah secara vertikal. Dalam melakukan penanganan *stunting*, pemerintah desa berpedoman pada arahan dan aturan dari pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan. Seperti keputusan kepala desa tentang penetapan kader posyandu, hal tersebut dilakukan berdasarkan arahan dari kecamatan yang mewajibkan setiap desa minimal memiliki 1 orang petugas *stunting*. Selain itu, integritas *street level bureaucracy* juga

diinterpretasikan dengan tindakan pemerintah desa dalam menyalurkan dana CSR dari perusahaan kepada masyarakat dalam penanganan *stunting*. Beberapa kali masyarakat sering mendapat bantuan berupa PMT dari perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan desa ini yang didistribusikan oleh pemerintah desa.

Integritas *street level bureaucracy* dapat ditunjukkan melalui konsistensi pemerintah desa menerapkan dasar hukum dan peraturan yang berlaku dalam penanganan *stunting*. *Street level bureaucracy* juga dapat dipercaya dalam menyalurkan dana CSR yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam penanganan *stunting*. Adanya jaminan yang diberikan oleh pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dapat menumbuhkan kepercayaan publik pada pemerintah (Bella, Kimbal, & Lopian, 2017). Masyarakat dapat mempercayai pemerintah desa dengan sepenuh hati karena pemerintah desa berhasil menjamin ketersediaan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Fairness (Keadilan)

Fairness atau keadilan adalah dimensi kepercayaan publik yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana pemerintah dapat memberikan perlakuan yang konsisten dan sama kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang dan identitas mereka (misalnya jenis kelamin, status sosial-ekonomi, asal ras/etnis) (OECD, 2017). Dalam hal ini, perlakuan pemerintah yang sama (adil) kepada seluruh masyarakat adalah untuk meningkatkan standar hidup/kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini, dimensi keadilan dapat ditunjukkan melalui sikap *street level bureaucracy* yang memberlakukan masyarakat secara adil dan merata dalam memberikan pelayanan terkait pencegahan dan penanganan *stunting*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan pelayanan yang adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan masyarakat mulai dari pemberian penyuluhan kepada kader posyandu, bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu-ibu yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun kelas pencegahan *stunting* pada ibu hamil setiap 1 tahun 1 kali, serta sosialisasi terkait preventif pernikahan dini dan pencegahan *stunting* kepada masyarakat. Sehingga semua masyarakat dapat memperoleh layanan yang sesuai dalam pencegahan dan penanganan *stunting*. Pemerintah desa melakukan berbagai upaya untuk memberikan layanan yang terbaik dan merata ke

semua masyarakat dalam mencegah dan menangani *stunting*, mulai dari sebelum hamil, ketika hamil, sampai setelah anak lahir itu pasti ada pelayanannya semua dari desa. Ada sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, dan bantuan makanan. Selain itu, kegiatan posyandu juga dilakukan secara merata di setiap dusun dengan jadwal yang telah ditentukan. Sehingga setiap target pencegahan dan penanganan *stunting* dapat memperoleh layanan yang sama.

Public trust dapat ditumbuhkan melalui adanya prinsip keadilan yang diterapkan oleh *street level bureaucrats* dalam memberikan layanan pada masyarakat. Hal ini telah diwujudkan pada dimensi keadilan yang berhasil diterapkan oleh *street level bureaucracy* dalam penanganan *stunting* yang kemudian berdampak pada meningkatnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah desa. Pelayanan publik yang mencerminkan keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan akan meningkatkan kepercayaan publik (Bella dkk., 2017). Sehingga pelayanan publik harus dapat dirasakan semua pihak dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

KESIMPULAN

Public trust terhadap penanganan *stunting* pada tingkat *street level bureaucracy* di Kabupaten Tuban telah memenuhi keempat dimensi yaitu *responsiveness* (ketanggapan), *reliability* (keandalan), *integrity* (integritas), dan *fairness* (keadilan). Akan tetapi belum memenuhi dimensi *openness* (keterbukaan). Pada dimensi ketanggapan, *responsiveness* *street level bureaucracy* dalam memberikan layanan tentang pencegahan dan penanganan *stunting* kepada masyarakat desa telah berhasil memenuhi harapan masyarakat. Pada dimensi keandalan *street level bureaucracy* memiliki performa yang baik dalam memupuk kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan tanggung jawab dan kewenangannya dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, melakukan sosialisasi terkait *stunting*, dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Pada dimensi integritas, *street level bureaucracy* telah secara konsisten dan kompak memberikan pelayanan publik dalam penanganan *stunting* dengan menerapkan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. *Street level bureaucracy* telah memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat dalam penanganan *stunting* sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada *street level bureaucracy*. Pada dimensi keadilan, *street level bureaucracy* telah memberikan layanan dalam pencegahan dan penanganan *stunting* secara

adil dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, penanganan *stunting* di tingkat *street level bureaucracy* belum memenuhi dimensi *openness* (keterbukaan) karena *street level bureaucracy* di Desa Kedungrejo, Desa Sumberejo, dan Desa Brangkal masih kurang optimal dalam memberikan informasi publik terkait dengan data *stunting* kepada masyarakat. Kurangnya informasi publik terkait data *stunting* di desa mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengawasi kinerja pemerintah desa secara optimal. Meskipun telah memenuhi keempat dimensi *public trust* tetapi *street level bureaucracy* belum berhasil menjalankan dimensi *openness* (keterbukaan), sehingga penanganan *stunting* di Desa Kedungrejo, Kedung Sumberejo, dan Desa Brangkal masih belum efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi agar *street level bureaucracy* di Kabupaten Tuban selalu memperbarui dan membagikan informasi publik serta mengembangkan layanan-layanan dalam pengendalian *stunting* yang lebih inovatif agar dapat menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H., Hadju, V., Zulkifli, A., Syam, A., Ansariadi, Stang, ... Helmiyanti, S. (2021). Dietary diversity, dietary patterns and dietary intake are associated with stunted children in Jenepono District, Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, 35, S483–S486. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.077>
- Bella, N., Kimbal, M. L., & Lapian, M. T. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–12.
- BKKBN. (2022, Oktober 7). Jawa Timur Tekan Prevalensi Stunting Lewat Tim Pendamping Keluarga. Diambil 1 April 2023, dari bkkbn.go.id website: <https://www.bkkbn.go.id/berita-jawa-timur-tekan-prevalensi-stunting-lewat-tim-pendamping-keluarga>
- Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., Andersen, C. T., DiGirolamo, A. M., Lu, C., ... Grantham-McGregor, S. (2017). Early childhood development coming of age: science through the life course. *The Lancet*, 389(10064), 77–90. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31389-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31389-7)
- Bommer, C., Vollmer, S., & Subramanian, S. V. (2019). How socioeconomic status moderates the stunting-age relationship in low-income and middle-income countries. *BMJ Global Health*, 4(1), e001175. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-001175>
- Brezzi, M., Gonzalez, S., Nguyen, D., & Prats, M. (2021). *An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges* (No. 48). Paris.
- Budge, S., Parker, A. H., Hutchings, P. T., & Garbutt, C. (2019). Environmental enteric dysfunction and child stunting. *Nutrition Reviews*, 77(4), 240–253. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuy068>
- Candarmaweni, & Rahayu, A. Y. S. (2020). Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang. 1st International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science and Sustainable Development, JESSD 2020, 1–9. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014>
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications, Inc.
- Databoks. (2020). Prevalensi Penderita Stunting Anak Usia di Bawah Lima Tahun (2020). Diambil 1 April 2023, dari databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/prevalensi-stunting-balita-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara#:~:text=Prevalensi%20stunting%20tertinggi%20ada%20di,dengan%20prevalensi%2030%2C%25>
- Davidovitz, M., & Cohen, N. (2022). Frontline social service as a battlefield: Insights from <sc>street-level</sc> bureaucrats' interactions with violent clients. *Social Policy & Administration*, 56(1), 73–86. <https://doi.org/10.1111/spol.12756>
- de Boer, N., & Eshuis, J. (2018). A street-level perspective on government transparency and regulatory performance: Does relational distance matter? *Public Administration*, 96(3), 452–467. <https://doi.org/10.1111/padm.12517>
- de Onis, M., & Branca, F. (2016). Childhood stunting: a global perspective. *Maternal & Child Nutrition*, 12, 12–26. <https://doi.org/10.1111/mcn.12231>
- Fitrotuzzaqiyah, I., & Rahayu, S. (2022). Implementasi Intervensi Spesifik Dalam Upaya Pencegahan Stunting Balita Di Desa Gambarsari Kecamatan Pagaden Kabupaten

- Subang. *Journal of Nutrition College*, 11(3), 236–247.
<https://doi.org/10.14710/jnc.v11i3.32165>
- Head, B. W. (2022). Policy Innovation in Turbulent Times. Dalam *Wicked Problems in Public Policy* (hlm. 123–139). Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94580-0_7
- Iswahyudi. (2022). Perilaku Birokrat Garis Depan (Street Level Bureaucrats) Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Governance and Politic (JGP)*, 2(1), 1–9.
- Kasmad, R., & Alwi, L. T. (2018). Discretion Dilemma of Street-Level Bureaucracy in Implementation of the Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City, Indonesia. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 2(8), 106–115.
- Kemenkes. (2022). *Buku Saku: Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. Jakarta.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service* (30th Ann). Russell Sage Foundation.
- Maesarah, M., Adam, D., Hatta, H., Djafar, L., & Ka'aba, I. (2021). Hubungan Pola Makan dan Riwayat ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Kabupaten Gorontalo. *Al GIZZAI: PUBLIC HEALTH NUTRITION JOURNAL*, 50–58.
<https://doi.org/10.24252/algizzai.v1i1.19082>
- Mahfouz, E. M., Sameh Mohammed, E., Alkilany, S. F., & Abdel Rahman, T. A. (2022). The relationship between dietary intake and stunting among pre-school children in Upper Egypt. *Public Health Nutrition*, 25(8), 2179–2187.
<https://doi.org/10.1017/S136898002100389X>
- McGovern, M. E., Krishna, A., Aguayo, V. M., & Subramanian, S. (2017). A review of the evidence linking child stunting to economic outcomes. *International Journal of Epidemiology*, 46(4), 1171–1191.
<https://doi.org/10.1093/ije/dyx017>
- Miles, M. B., Michael, H., & Jonny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3 ed.). London: Sage Publication Ltd.
- Mohammed, S. H., Muhammad, F., Pakzad, R., & Alizadeh, S. (2019). Socioeconomic inequality in stunting among under-5 children in Ethiopia: a decomposition analysis. *BMC Research Notes*, 12(1), 184.
<https://doi.org/10.1186/s13104-019-4229-9>
- Muhtar, M., Pudjianto, B., & Habibullah, H. (2022). Social approach to stunting prevention in Bora, Central Java, Indonesia. *Simulacra*, 5(2), 13–28.
<https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.15909>
- Murtin, F., Fleischer, L., Siegerink, V., Aassve, A., Algan, Y., Boarini, R., ... Smith, C. (2018). *Trust and its determinants Evidence from the Trustlab experiment*.
- Neuman, L. W. (2016). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach* (7 ed.). England: Pearson Education Limited.
- OECD. (2017). *Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust*. Paris: OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264268920-en>
- Raj, E., Calvo-Urbano, B., Heffernan, C., Halder, J., & Webster, J. P. (2022). Systematic review to evaluate a potential association between helminth infection and physical stunting in children. *Parasites & Vectors*, 15(1), 135.
<https://doi.org/10.1186/s13071-022-05235-5>
- Salsabila, O. D., & Kumala, R. (2022). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Transparansi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Cibitung). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 446–453.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v2i4.2951.g1388>
- Schmidhuber, L., Ingrams, A., & Hilgers, D. (2021). Government Openness and Public Trust: The Mediating Role of Democratic Capacity. *Public Administration Review*, 81(1), 91–109.
<https://doi.org/10.1111/puar.13298>
- Shim, D. C., Park, H. H., & Eom, T. H. (2017). Street-level bureaucrats' turnover intention: does public service motivation matter? *International Review of Administrative Sciences*, 83(3), 563–582.
<https://doi.org/10.1177/0020852315582137>
- Singh, D. P., Biradar, R. A., Halli, S. S., & Dwivedi, L. K. (2021). Effect of maternal nutritional status on children nutritional status in India. *Children and Youth Services Review*, 120, 105727.
<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105727>
- Sirajuddin, Sirajuddin, S., Razak, A., Ansariadi, Thaha, R. M., & Sudargo, T. (2021). The Intervention of Maternal Nutrition Literacy

- Has the Potential to Prevent Childhood Stunting: Randomized Control Trials. *Journal of Public Health Research*, 10(2), jphr.2021.2235. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2235>
- Togola, A. U., Pandie, D. B., & Rani, L. P. S. (2020). Akuntabilitas Street-Level Bureaucracy Dalam Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Oesapa. *Jurnal Administrasi dan Demokrasi*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/10.1002/pad.1911>
- UNICEF, WHO, & Group, W. B. (2021). Levels and trends in child malnutrition. *Joint Child Malnutrition Estimates 2021 edition*.
- Vaslavskiy, Y., Vaslavskaya, I., & Bilyalova, A. (2022). The State and the Coronavirus Pandemic: Missed Opportunities for Social and Economic Progress. Dalam *Public Economics - New Perspective and Uncertainty*. London: IntechOpen Limited. <https://doi.org/10.5772/intechopen.107546>
- Vilcins, D., Sly, P. D., & Jagals, P. (2018). Environmental Risk Factors Associated with Child Stunting: A Systematic Review of the Literature. *Annals of Global Health*, 84(4), 551. <https://doi.org/10.29024/aogh.2361>
- Weatherspoon, D. D., Miller, S., Ngabitsinze, J. C., Weatherspoon, L. J., & Oehmke, J. F. (2019). Stunting, food security, markets and food policy in Rwanda. *BMC Public Health*, 19(882), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7208-0>
- Webb, C. M., Morales, M. L., Lopez, M., Baca-Turpo, B., Arque, E., White, A. C., & Cabada, M. M. (2021). Stunting in pre-school and school-age children in the Peruvian highlands and its association with Fasciola infection and demographic factors. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 15(6), e0009519. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009519>
- Zhang, H., Yang, L., Walker, R., & Wang, Y. (2020). How to influence the professional discretion of street-level bureaucrats: transformational leadership, organizational learning, and professionalization strategies in the delivery of social assistance. *Public Management Review*, 1–25. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1805919>